

Laporan Studi Lapangan

Golput, Mengapa Terus Meningkatkan?

Oleh Tim Redaksi

“Tidur yang paling nikmat adalah saat coblosan”

Ungkapan di atas datang dari Aceh Zamzam Noer, seorang penyair. Sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan pesta demokrasi, tetapi kemungkinan akan semakin tidak diminati oleh rakyat. Pemilu dari waktu ke waktu ditandai semakin meningkatnya golongan putih, atau yang lebih populer dengan akronim Golput. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap Pemilu, baik Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pilihan Legislatif semakin menurun secara cukup signifikan.

Meski pada Pemilu 1999, tingkat partisipasinya cukup tinggi dan antusiasme masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya berbeda dengan pada era Orde Baru, yaitu lebih didorong oleh kesadaran untuk berdemokrasi, akan tetapi pada Pemilu 2004 tingkat partisipasi masyarakat mulai menurun, dan fenomena golongan putih (Golput) atau warga yang tidak menggunakan hak pilihnya semakin meningkat.

Gejala meningkatnya Golput itu semakin tampak

nyata pada perilaku pemilih dalam Pilkada baik untuk Bupati/Walikota maupun Gubernur. Bahkan dalam lima tahun terakhir ini kecenderungan maraknya Golput itu semakin memprihatinkan. Dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang dilakukan pada 2005-2008, 13 Pemilu gubernur di antaranya “dimenangi” oleh golongan putih atau Golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah dibandingkan dengan jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. “Kemenangan” Golput terjadi pada Pemilu kepala daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, dan Banten. Kondisi serupa terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur putaran I, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Pemilu kepala daerah kabupaten/kota mengalami hal sama, dari 130 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, 39 Pemilu kepala daerah kabupaten/kota “dimenangi” Golput.

Jika dilihat dari tingkat persentasenya di beberapa daerah angka Golput memang tinggi. Tengok saja Pilkada Banten mencatat 40 persen Golput. Pilkada Jawa Barat mencatat angka Golput lebih dari 33 persen, Pilkada DKI Jakarta 35 persen,

Pilkada Kepulauan Riau 46 persen, dan yang paling fenomenal di Jawa Tengah Golput mencapai 69 persen. Demikian pula Jatim sebagai salah satu propinsi yang terbanyak jumlah penduduknya juga ikut-ikutan: angka Golput tinggi, yaitu mencapai 42 %.

Besarnya jumlah Golput dalam Pemilu kepala daerah diprediksi akan merembet ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.

Fenomena semakin meningkatnya Golput, akan mempunyai konsekuensi terhadap tingkat legitimasi pemerintahan. Dalam perspektif teori politik, jika tingkat Golput melebihi 50 % maka derajat legitimasi suatu pemerintahan sangat rendah, dan tidak cukup absah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Beberapa riset menunjukkan tingkat partisipasi dalam Pilkada di berbagai daerah, semakin memperlihatkan gejala yang makin menurun¹. Sejumlah pengamat politik menunjuk itu sebagai adanya gejala “Golput,” akronim dari ‘golongan putih,’ yakni orang-orang yang menolak untuk ikut pemilihan disebabkan karena kecewa dan tidak puas pada sistem politik yang ada, dan khususnya pada Pilkada atau Pemilu yang melahirkan sistem politik tersebut. Para aktivis yang kritis pada pemerintah telah

¹ Lihat tulisan Kacung Marijan di dalam edisi ini

menjadikan gejala ini sebagai indikasi ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.

Rendahnya tingkat pemilih ini, bagaimanapun telah menggelisahkan pemerintah dan terutama para pimpinan partai. Gejala Golput rupanya masih sering dilihat dalam konteks politik "Orde Baru" masa lalu, di mana Golput dianggap sebagai penolakan total terhadap keabsahan Pemilu², dan tingkat pemilih diandaikan bisa mencapai 90% lebih. Tentu saja ini harapan yang romantis dan ahistoris. Di negara-negara yang kehidupan demokrasinya sudah mapan pun, tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu cenderung rendah. Di Amerika Serikat,

misalnya, tingkat partisipasi pemilih di dalam Pemilu hanya pada kisaran 50-an persen.

Meski demikian, kekhawatiran ini cukup beralasan juga. Makin rendah tingkat partisipasi pemilih, maka makin rendah juga kadar legitimasi politik pemimpin yang terpilih. Tentu akan menjadi ironi jika prosentasi antara yang memilih lebih rendah daripada yang tak memilih, seperti terjadi dalam sejumlah Pilkada dan juga banyak kasus calon tunggal versus kotak kosong dalam pemilihan lurah. Legitimasi inilah yang menjadi titik kekhawatiran pemerintah dan para calon pemimpin partai tersebut. Karena itu, menekan angka Golput—sehingga ada yang membuat fatwa haram segala—menjadi relevan³.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat par-

tisipasi dalam Pemilu, antara lain: (1) delegitimasi Parpol akibat kinerjanya yang kurang berorientasi pada pelayanan public; (2) Perilaku politisi yang buruk, tidak jujur, korup, dan kurang kapabel; (3) Kinerja KPU yang kurang profesional; dan (4) kejenuhan warga masyarakat terhadap aktivitas politik, karena berpolitik tidak membawa ke arah perbaikan kualitas hidup baik secara ekonomi, social, maupun politik.

Deligitimasi Parpol

Bahwa ada tingkat penurunan partisipasi pemilih sudah tidak bisa dibantah lagi. Tetapi apakah ia benar-benar merupakan gejala Golput? Dalam catatan sejarah, Golput yang dimotori oleh sejumlah intelektual seperti Arief Budiman pada tahun 1970, merupakan sebuah gerakan politik yang menyuarakan kritik terhadap rezim Orde Baru dan pelaksanaan Pemilu yang tidak demokratis yang menjadi landasan orde tersebut. Mengikuti Pemilu, dalam pandangan mereka, berarti mengabsahkan proses Pemilu dan rezim yang mereka lawan itu. Sebagai gerakan, Golput waktu itu memiliki bendera sendiri (segi-lima berwarna putih) dan lambang jari empat, melakukan pertemuan-pertemuan, menggelar 'kampanye', dan berbicara di media. Singkatnya, para aktivis dan pendukungnya secara sadar melakukan seruan agar para pemilih tidak menggunakan

haknya di dalam Pemilu⁴. Catatan dari hasil studi observasi dan wawancara-wawancara di daerah yang jauh dari Jakarta, barangkali bisa menjawab pertanyaan ini, dan sekaligus memberikan gambaran yang lebih bernuansa mengenai 'mengapa tingkat partisipasi itu diperkirakan menurun,' suatu gejala yang secara tergesa-gesa sering disebut sebagai 'Golput' itu.

Mengapa orang semakin enggan berpartisipasi dalam Pemilu, salah satu penyebabnya adalah bahwa mereka merasa tidak cukup melihat adanya tanda-tanda bahwa Parpol menunjukkan kinerjanya yang semakin baik. Dari dulu hingga sekarang, menurut penilaian konstituen Parpol hanya peduli pada konstituen jika hanya menjelang Pemilu. Setiap kali menjelang Pemilu, para elite Parpol banyak mengumbar janji manis ke

2. Ariel Heryanto, "Seakan-akan Pemilu," dalam Ifdal Kasim, *Mendemokratisikan Pemilu*, Elsam, Jakarta, 1996.

3. Baru-baru ini misalnya sejumlah ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur membuat fatwa 'haram' terhadap mereka yang tidak memilih, dan menyatakan 'jardhu 'ain' (wajib secara individual) untuk memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

4. Lihat Arbi Sanit (ed.), *Golput*, Sinar Harapan, 1992.

pada rakyat, akan tetapi setelah Pemilu janji hanya tinggal janji, tidak pernah ditepati.

Penilaian semacam itu datang dari hampir semua informan yang dijumpai di lapangan, baik di Palembang, Bandung, Surabaya, Mataram, Makasar, maupun di Semarang. Mereka rata-rata menilai Parpol kurang mempunyai program yang jelas untuk mewujudkan janji-janjinya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan berbagai program berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, tidak pernah diwujudkan. Ketika harga kebutuhan pokok terus merangkak naik, tidak ada satu pun program Parpol yang peduli dengan kian beratnya beban rakyat. Oleh karena itu masyarakat semakin tidak percaya kepada Parpol jika berkaitan dengan upaya menyelesaikan berbagai persoalan riil yang dihadapi warga masyarakat sehari-hari. Seorang informan di Palembang menuturkan:

" Masyarakat merasa dimanfaatkan oleh Parpol dengan diiming-imingi janji kampanye melulu. Sekarang masyarakat sudah mulai tahu dan bisa menilai visi-misi dan kinerja Parpol, dan bagi rakyat semua itu hanya janji-janji surga aja."

Ketidakkampuan Parpol secara konsisten mewujudkan janji-janji kampanye itu menyebabkan legitimasi Parpol di mata rakyat kian merosot. Proses delegitimasi Parpol ini lebih merupakan problem yang bersumber dari dalam Parpol sendiri. Kegagalan melakukan pelembagaan politik, dengan menjalankan fungsinya sebagai lembaga publik, semakin membuat Parpol jauh dari aktivitas warga

sehari-hari. Sekretariat Parpol kebanyakan hanya sibuk menjelang Pemilu, sementara setelah Pemilu selesai, sekretariat tidak berdenyut. Tiadanya kegiatan sekretariat Parpol secara rutin itu, merupakan indikator betapa Parpol tidak melakukan apa-apa dalam upaya melayani kepentingan konstituennya. Akibatnya masyarakat semakin tidak percaya kepada kinerja Parpol, dan ekspresi ketidakpercayaan itu terwujud pada ketidakbersediaan hadir dalam bilik pencoblosan dalam Pemilu.

Di mata masyarakat Parpol semakin tidak mampu membawa perubahan sebagaimana yang dijanjikan. Pendidikan mahal, pelayanan kesehatan yang buruk, beban ekonomi rakyat yang kian berat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terus menjadi persoalan rutin yang dihadapi rakyat. Parpol tidak mampu mendorong terjadinya perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik, sehingga rakyat cenderung malas ikut Pemilu sebagaimana dituturkan oleh informan di Mataram berikut ini:

"Rakyat semakin malas, cuek, dan bosan ikut Pemilu. Beberapa kali Pemilu tidak ada perubahan mendasar. Jadi, bagi mereka, buat apa ikut Pemilu. Sikap ini menurutnya berlangsung terutama di perkotaan, di kalangan orang-orang yang terdidik. Meski demikian, sikap itu hanya individual saja, tapi karena banyak dan massif, ya jadi signifikan."

Suara senada juga ditemukan di Surabaya misalnya, dari hasil wawancara ditemukan bahwa sebagian besar responden, meskipun masih dalam tahapan penilaian sangat dini, dan kemungkinan besar masih akan berubah tergantung situasi berkembang, pada umumnya bersikap skeptis terhadap perkembangan politik sekarang. Sebuah sikap politik hasil dari penilaian mereka terhadap pengalaman politik selama ini dan dalam menatap perkembangan demokrasi. Sebagian besar, kurang lebih separo responden, menilai demokrasi, khususnya Pemilu

2009, akan berjalan sesuai dengan harapan mereka, sementara sebagian lainnya menilai tidak akan ada perubahan berarti, atau berjalan biasa-biasa saja, dan sebagian lainnya menilai akan berjalan lebih buruk dari Pemilu sebelumnya.

Sikap politik demikian tidaklah berdiri sendiri, melainkan sangat tergantung pada penilaian mereka terhadap kinerja atau performa institusi-institusi demokrasi, khususnya terhadap lembaga KPU dan partai politik. Hanya sebagian kecil responden menilai partai politik sekarang telah memperjuangkan kepentingan warga negara, sementara sebagian besar dari mereka menilai partai politik belum memperjuangkan kepentingan warga negara. Bahkan sebagian dari mereka menilai partai politik sekarang ini masih buruk kinerja politiknya.

Namun demikian, harapan tinggi diberikan oleh mereka terhadap partai-partai politik yang ada ke depan, dengan menekankan pentingnya peran partai politik untuk semakin memperjuangkan kepentingan masyarakat, selain berharap agar partai politik semakin memfungsikan perannya dalam mencetak kader kepemimpinan dan meningkatkan komunikasi politik mereka dengan warga masyarakat.

Senada dengan pengakuan di atas juga apa yang dikemukakan beberapa informan di Semarang, Bandung, dan Surabaya, maupun Makasar. Tidak bisa dipungkiri, kesan apatisisme masyarakat terhadap Pemilu ada hubungannya dengan ketidakmampuan Parpol memenuhi janji kampanye dan membawa perubahan. Bahkan sebagian masyarakat merasakan bahwa kondisi sosial ekonomi mereka tidak semakin membaik, sehingga untuk apa ikut politik dengan menggunakan haknya sebagai pemilih dalam Pemilu.

Kinerja KPU

Sebab lain, mengapa Golput kian meningkat adalah ketidakmampuan KPU memperbaiki kinerjanya. Masalah pendataan pemilih yang tidak akurat dan tidak merata, penyusunan jadwal kegiatan yang tidak runtut, dan seretnya pendanaan adalah sederet masalah yang mempunyai akibat terhadap munculnya fenomena peningkatan Golput. Seorang informan di Makasar menuturkan:

"Masalah teknis juga menjadi kendala partisipasi masyarakat, pendataan KPU yang kurang valid dan aturan-aturan yang selalu berubah membuat orang sulit dan kurang paham bagaimana cara menggunakan hak pilih. Karena merasa sulit atau tidak terdapat maka dia tidak mau ikut memilih. Kekurangan dari sisi pendataan adalah karena KPU kurang aktif termasuk dengan memanfaatkan semua perangkat sampai pada tingkat RT/RW. Ini juga terjadi ketika Pilkada, akibat kurang adanya pendataan yang akurat, banyak warga masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Hal itu disebabkan karena ketidakakuratan aparat yang menangani pendataan dalam waktu yang relatif terbatas, sehingga kemungkinan sebagian dari mereka menggunakan angka prakiraan atau asumsi. Ke depan sebaiknya melibatkan RT dan RW secara maksimal."

Masalah ketidakakuratan pendataan pemilih memang sering dijumpai dalam penyelenggaraan Pemilu dari Pilpres, Pemilu Legislatif, hingga Pilkada.

Menurut seorang informan di Mataram, yang penting untuk dilakukan sekarang adalah agar KPUD melakukan pemutakhiran data. Menurut pengamatannya, data pemilih Pilkada kemarin masih pakai data Pemilu 2004. Itu sudah out of date. Ia memberi contoh riil Anak tertuanya yang tahun 2004 belum berhak memilih, tahun 2008 ini sudah berhak. Tapi kemarin nama anaknya tidak terdaftar, tidak mendapat kartu pemilih. Banyaknya yang tidak terdaftar, membuat masyarakat curiga bahwa ada fak-

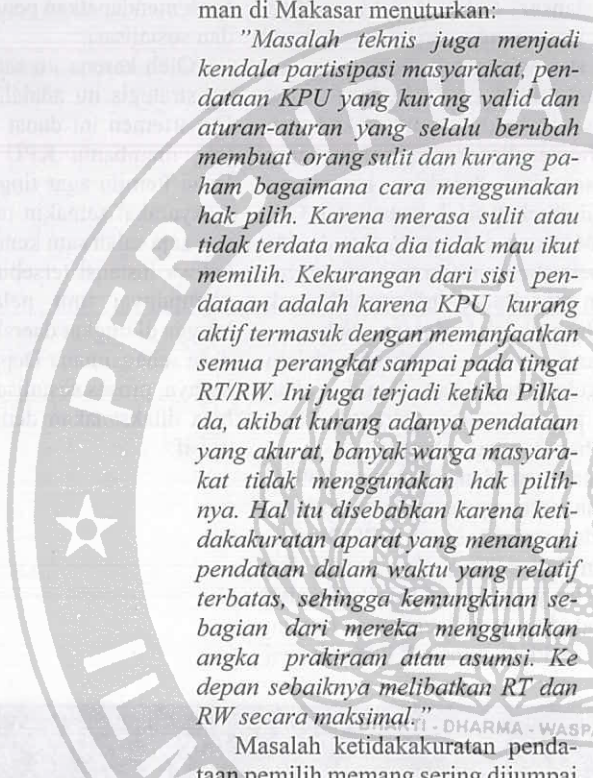
tor kesengajaan, KPUD bisa dianggap tidak netral, sehingga membuat mereka tidak ikut Pemilu. Mereka bilang, "Iha anak saya saja, atau saudara saya saja gak ikut tidak apa-apa, ya saya nggak usah ikut saja." Nah, dia menyarankan agar segera dilakukan pemutakhiran data.

Salah seorang informan juga melihat potensi Golput di NTB sangat tinggi, seperti terlihat dalam Pilkada beberapa bulan yang lalu. Sebabnya macam-macam. Di antara yang sempat diamatinya, ada mereka yang sudah masuk dalam data pemilih, tapi tidak mendapat kartu pemilih. Kasus ini, menurut pengetahuannya, sangat besar. Ia belum bisa memastikan, apakah ini faktor kecerobohan administrasi atau faktor kesengajaan, untuk kepentingan memenangkan salah satu calon. Tapi di antara sumbangan terhadap suara Golput kemarin, menurutnya berasal dari sini.

Ada beberapa argumen yang diungkapkan oleh pihak KPU sendiri dalam menyikapi masalah tersebut. Antara lain adalah masalah keterbatasan SDM yang ada, sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan pendataan secara cepat dan masal. Akan tetapi lebih dari itu semua adalah keterbatasan dana, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang anggota KPU Kota Bandung yang menjadi informan studi ini.

"Memang kami akui, bahwa masalah pendataan dan sosialisasi masih menjadi problem yang kami hadapi, sehingga kurang optimal hasil Pemilu, terutama kaitannya dengan meningkatnya Golput. Akan tetapi, kami selama ini kesulitan dana, sebab sangat tergantung dana yang disediakan oleh pemerintah, dan sering kali pencairannya tertunda. Sementara jika kami akan melakukan kerjasama dengan mitra strategis, tetap saja semua itu tidak bisa dilakukan secara gratis."

Persoalan dana memang selalu menjadi kendala utama bagi upaya mengoptimalkan kinerja KPU. Keterlambatan pencairan dana se-



bagai konsekuensi prosedur legal dalam penggunaan dana APBN/APBD sering kali menjadi tidak mudah bagi KPU untuk mendapat dana segar secara cepat. Bahkan tidak jarang, kegiatan awal harus diundur satu dua bulan, karena harus menunggu dana. Pemerintah sering kali memberikan dana talangan, tetapi dari pos non-bugeter sehingga cukup sensitif mendapat kritikan dari masyarakat.

Dalam hal ini ia melihat peran KPUD dalam sosialisasi kampanye sangat kurang sekali. Menurut salah seorang informan di Mataram, KPUD harus lebih bekerja keras lagi dalam sosialisasi pentingnya Pilkada/Pemilu dalam proses politik agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi dalam Pemilu. Sebab, selama ini walaupun ada yang tidak memilih, itu karena mereka tidak terdaftar saja, atau bingung dan tidak tahu mau mendaftar ke mana. Menurutnya, ia banyak menemukan kasus seperti ini. Sekali lagi ini karena kurang maksimalnya kerja panitia, terutama dalam hal ini yang dikoordinasi KPUD, untuk mensosialisasikan pentingnya Pilkada/Pemilu. Ia menduga, gejala yang sama akan terjadi dalam Pemilu nasional 2009 akan datang.

Jadi peran KPU cukup penting dalam upaya menekan semakin rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemilu. Semakin kinerja KPU bagus, maka sedikit banyak tingkat partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Seorang informan dari Palembang mengatakan:

"Inilah peran KPU. Rentang waktu yang masih ada sekarang ini bisa dimanfaatkan KPU untuk mendo-

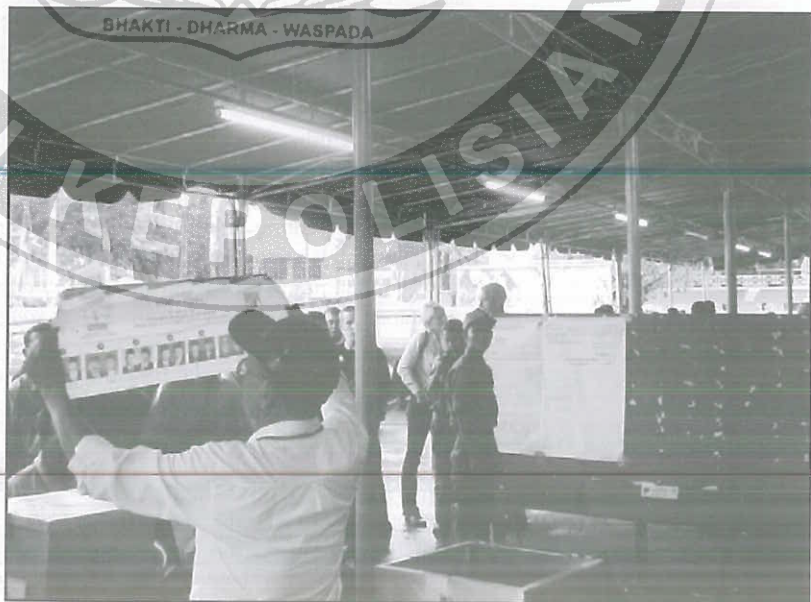
rong masyarakat agar tidak Golput. Saya yakin angka Golput tidak akan semakin tinggi di Pemilu legislatif dan eksekutif selama peran KPU, Pemerintah dan media bergotong royong menyampaikan informasi dan pendidikan politik pada masyarakat."

Masalah sosialisasi juga cukup menyulitkan KPU ketika lagi-lagi harus berkaitan dengan anggaran yang tidak lancar. Selama ini kemudian KPU menempuh kerjasama dengan mitra strategis untuk melakukan sosialisasi. Jika di era Orde Baru semua itu bisa dilakukan secara efektif oleh Departemen Penerangan, akan tetapi sekarang tidak demikian, karena sudah dibubarkan sejak pemerintah Gus Dur. Memang di jajaran Pemda ada unit penyebaran informasi, seperti Infokom atau Badan Informasi Daerah yang bisa diajak kerjasama. Sebagian memang sudah membantu dalam melakukan sosialisasi Pemilu, akan tetapi perannya sangat terbatas, karena terbentur anggaran pula.

Berkaitan dengan peran KPUD lagi, ia berharap agar dalam pendataan dan sosialisasi itu, KPUD melibatkan Kadus dan Kades. Karena dua orang itu yang tahu dinamika jumlah kependudukan di daerahnya. Ia tahu bahwa KPUD punya KPPS sebagai

kaknya, tapi ia sekali lagi berharap untuk kepentingan sosialisasi aparat pemerintahan tingkat desa dan dusun bisa lebih dilibatkan lagi. Bahkan ia juga berharap KPUD juga mengumpulkan para pimpinan partai untuk sosialisasi Pemilu tersebut. Alasan lain, masyarakat kita menurutnya belum sampai pada tingkat memilih yang kritis. Mereka masih harus banyak mendapatkan pendidikan politik dan sosialisasi.

Oleh karena itu satu satunya mitra strategis itu adalah Depkominfo. Departemen ini dapat berperan penting membantu KPU dalam sosialisasi Pemilu agar tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat. Hanya saja salah satu kendalanya adalah bahwa instansi tersebut saat ini tidak mempunyai unit pelaksana teknis hingga di tingkat daerah atau ke desa-desa sebagaimana Deppen dulu. Akibatnya, proses sosialisasi tidak cukup bisa dilaksanakan dengan cepat dan masif.



Kejenuhan Masyarakat

Kejenuhan masyarakat juga merupakan penyebab makin rendahnya tingkat partisipasi Pemilu. Sejak adanya pilihan langsung, rakyat semakin sering mengikuti berbagai Pemilu, baik dari tingkat Pilkades, Pilkada Kabupaten/Kota, Pilkada Gubernur, dan Pilpres, dan Pilihan Caleg. Tingginya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam Pemilu itu membuat masyarakat menjadi jenuh. Seorang informan di Semarang mengungkapkan:

"Sekarang ini frekuensi keterlibatan masyarakat dalam berbagai Pemilu begitu tinggi. Di daerah pesisir Jawa Tengah misalnya, di tingkat desa saja sudah ada dua pilihan langsung, yaitu Pilkades dan Pilihan Kepala dukuh, bahkan ada pula di beberapa desa Carik atau Sekretaris Desa juga dipilih secara langsung. Jadi dalam kurun lima tahun rakyat terlibat tujuh kali pilihan langsung. Karena itu, rakyat merasa jenuh dengan Pemilu."

Dalam berbagai keterangan yang diberikan oleh warga, nuansa kejenuhan itu memang terasa sekali. Di Bandung misalnya, seorang pegawai stasiun mengaku malas mengikuti Pemilu karena di samping tidak membawa perubahan nasib ke arah yang lebih baik, juga terlalu sering mengikuti Pemilu, sehingga ia merasa bosan. Demikian pula pengakuan seorang pegawai Pemda di Semarang, ia terus terang mengakui bahwa di era reformasi ini demokrasi terlalu kebablasan, apa-apa di adakan pilihan langsung, termasuk voting-voting di lingkungan instansi ketika memutuskan apa saja. Memang itu suatu hal yang wajar dalam alam demokrasi, tetapi lama-lama menjadi jenuh jika terlalu sering dilakukan.

Berkaitan dengan Pemilu 2009 yang akan datang, seorang informan di Mataram khawatir tingkat partisipasi akan menurun dikarenakan bosan dan jenuh. Karena menurutnya, sisa-sisa kelelahan Pilkada baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kotamadya masih terasa di masyarakat. Apalagi proses Pilkada di daerah sini selalu disertai konflik dan sengketa,

baik dalam proses maupun terhadap hasil perhitungan. Tetapi sekali lagi, jika ada penurunan tingkat partisipasi ini, itu bukan karena ada Golput. Itu semata-mata karena faktor kejenuhan dan kebosanan.

Tingginya frekuensi Pemilu itu memang merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya partisipasi publik terhadap berbagai aktivitas politik. Bahkan dalam proses pemilihan pimpinan di berbagai instansi, lingkungan perguruan tinggi, dan di tingkat RT pun sering kali melalui mekanisme pilihan langsung. Bahkan dalam mekanisme pengambilan keputusan, juga melalui voting jika kesepakatan bersama gagal menghasilkan keputusan.

Akan tetapi ada juga informan yang merasa senang dengan semakin tingginya frekuensi Pemilu di daerah-daerah, karena mereka sering kali mendapat sesuatu dari para elite yang berkepentingan dalam pemilihan. Ia mengaku sering mendapat uang jika akan ada Pemilu, bahkan Pilkades. Paling tidak mereka sering mendapat pembagian sembako atau kaos bergambar atribut Parpol atau nama seorang calon. Berbagai bantuan pun memang sering mengalir ke masyarakat berkaitan dengan menjelang Pemilu. Para elite politik sering berlomba-lomba memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai bagian dari strategi kampanye mereka.

Namun derasnya politik bantuan itu juga tidak dengan serta merta mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Sebab pragmatisme sudah sedemikian merasuk dalam struktur kesadaran warga masyarakat. Meski mereka diberi bantuan atau bahkan diberi uang, belum tentu mereka ikut Pemilu. Mereka hanya butuh bantuan atau uang saja, karena hampir setiap elite yang berkepentingan dalam pemilihan semuanya memberikan bantuan. Jadi warga masyarakat menjadi bingung dalam menentukan pilihan, karena itu daripada sulit-sulit mereka lebih baik memutuskan tidak menggunakan hak pilihnya.

Gerakan Golput

Isu yang santer berkembang dalam masyarakat adalah bahwa meningkatnya Golput juga karena ada yang menggerakkan. Gus Dur misalnya, adalah tokoh yang paling getol menganjurkan agar dalam Pemilu 2009 tidak usah ikut atau memilih jadi Golput saja. Tentu saja anjuran Gus Dur itu berkaitan dengan konflik internal dalam tubuh PKB yang terpecah menjadi dua kubu, yaitu antara kubu Muhaimin Iskandar dan Kubunya Ali Maskur Musa yang didukung Gus Dur. Sementara itu, dalam proses sengketa di pengadilan, kubu Gus Dur dikalahkan di tingkat Mahkamah Agung. Kekecewaan inilah yang memicu adanya gerakan Golput, setidaknya di kalangan warga Nahdliyin yang selama ini menjadi basis pendukung PKB.

Golput sebagai sebuah gerakan politik sebenarnya sudah ada sejak era Orde Baru sebagai protes atas tidak demokratisnya proses Pemilu yang dipelopori oleh Arief Budiman. Meski tidak mendapat pengaruh secara lebih luas, akan tetapi di kalangan terdidik, terutama di kalangan perguruan tinggi dan aktivis pro demokrasi. Seberapa besarkah pengaruh Golput sebagai sebuah gerakan politik? Seorang informan di Semarang mengatakan:

"Menurut perkiraan saya, gerakan Golput yang dipelopori oleh Gus Dur itu untuk saat ini tidak akan efektif, kecuali di kalangan pendukung fanatik Gus Dur sendiri. Sekarang ini yang paling berpengaruh adalah uang, sehingga rakyat jika diiming-imingi uang pasti akan mau ikut kegiatan Pemilu."

Senada dengan pernyataan tersebut, juga diungkapkan oleh informan di Mataram. Berkaitan dengan seruan Gus Dur untuk Golput, ia bilang tidak berpengaruh di sini, karena warga NTB kebanyakan adalah anggota NW (Nahdlatul Wathan), yang memang memiliki kesamaan ajaran dengan NU, tapi tetap tidak memiliki hubungan politik. Pengaruhnya, menurutnya mungkin hanya terbatas di kalangan mahasiswa anggota PMII.

Jadi dia yakin, tidak akan ada Golput di NTB ini.

Pragmatisme memang telah menjadi arus utama dalam Pemilu era reformasi sekarang ini sebagai konsekuensi demokrasi elektoral. Charles Schaffer (2007) mengatakan, politik uang merupakan fenomena umum dalam Pemilu yang kompetitif. Apalagi ketika kondisi masyarakat masih dalam keadaan miskin sebagaimana di Indonesia, maka program partai tidak akan efektif menarik simpati warga. Mereka lebih tertarik hal yang lebih konkret, yaitu bantuan nyata entah dalam bentuk barang atau uang. Pemilu dalam masyarakat yang penduduknya kebanyakan miskin, maka akan rentan dengan pembelian suara (vote buying).

Kalangan politisi sendiri sudah menyadari akan pentingnya faktor uang atau dana dalam upaya meraih simpati rakyat. Tokoh-tokoh masyarakat yang ikut terlibat dalam kancah pertarungan politik, yang meskipun sebelumnya membangun kredibilitas dari basis kultur, akhirnya harus mengikuti arus yang pragmatisme politik. Para tokoh itu juga harus menyediakan logistik yang cukup jika ingin meraih dukungan signifikan dari konstituen. Segenap politisi mengaku bahwa sekarang rakyat makin realistis, dan jika kampanye hanya mengandalkan platform Parpol tidak akan jalan. Masyarakat minta kejelasan akan memperoleh apa jika harus disuruh mendukung para politisi yang ingin meraih kekuasaan baik di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Memang faktor ideologis masih berperan dalam mengendalikan perilaku pemilih pada setiap Pemilu di era reformasi. Akan tetapi itu lebih pada Pemilu legislatif, sedangkan pada Pemilu eksekutif, faktor ideologis tidak begitu penting, sebagai konsekuensi konfigurasi pasangan yang berbasis koalisi Parpol. Gencarnya para politisi yang berkompetisi dalam Pemilu, mau tidak mau harus berlomba dalam memberikan pembe-

rian sesuatu, entah dalam ujud bantuan material atau uang. Fakta ini dengan terang-terangan diakui oleh politisi, karena rakyat lebih meminta yang riil, tidak mau dengan sekadar janji-janji yang tertuang dalam platform atau program-program yang ditawarkan. Maraknya ajakan dan rayuan para politisi dengan iming-iming bantuan material itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada

anjuan untuk ikut menjadi Golput sebagai suatu gerakan politik yang dipelopori oleh beberapa elite politik.

Salah seorang informan di Mataran mencoba memberilam keterangan bahwa tidak ada Golput di dalam masyarakat. Kalau pun ada kesan Golput dalam statistik para pemilih, itu adalah suara tidak sah yang disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat akan mekanisme pemilihan, tetapi tidak bisa dianggap sebagai Golput, dalam arti ada unsur 'melawan' atau

'tidak setuju' terhadap pemerintah atau sistem dan perundangan Pemilu. Di sisi lain, Usman mengakui bahwa memang ada masyarakat yang tidak ikut seperti dalam Pilkada kemarin, tapi lebih memilih pergi ke sawah atau berjualan di pasar. Ini menurutnya karena kurangnya kesadaran politik, dalam hal ini akan pentingnya Pilkada dalam proses politik. Ia tidak menganggap ini sebagai Golput, tapi sekadar 'cuek' atau 'tidak peduli' saja.

Antara Hak Dan Kewajiban

Fenomena Golput juga mempunyai kaitan dengan tingkat kesadaran politik masyarakat. Sebegitu jauh masih berkembang pada sebagian warga masyarakat bahwa ikut Pemilu itu adalah kewajiban dan bukan sebagai hak politik. Dalam struktur kesadaran mereka ikut berpartisipasi dalam Pemilu adalah kewajiban yang dianjurkan oleh pemerintah, karena itu jika tidak ikut akan merasa menentang atau takut dituding sebagai melawan pemerintah. Kesadaran semacam itu sekarang pun masih tumbuh kuat di kalangan masyarakat, terutama di lapisan bawah dan tinggal di pedesaan.

Mengapa mereka menganggap ikut Pemilu adalah kewajiban? Hal ini ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu, terutama di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, demokrasi surut sebagai konsekuensi pilihan sadar Soeharto yang lebih memilih sistem politik otoriter dengan kekuasaan politik memusat pada eksekutif. Seluruh aspek legalitas direayasa sedemikian rupa untuk melegitimasi sentralisasi kekuasaan yang berporos pada kekuasaan Presiden. Dengan menerapkan negara korporatis⁵, Soeharto melakukan kontrol secara ketat terhadap seluruh kekuatan masyarakat yang terorganisir, tidak terkecuali partai politik. Pelan tapi pasti, Soeharto melakukan penyederhanaan

Parpol melalui strategi fusi dengan menerapkan asas tunggal Pancasila. Negara tampil begitu perkasa, yang melakukan politik pengendalian dan politik perizinan terhadap aktivitas sosial politik masyarakat, sehingga tidak ada satu kekuatan alternatif yang mampu mengimbangi kekuasaan eksekutif.

Sudah bisa diduga, dalam situasi politik seperti itu maka kehidupan demokrasi mengalami masa surut, dan Parpol sebagai salah satu pilar demokrasi eksistensinya sangat lemah. Parpol tidak lebih sekadar ornamen politik, yang hanya berfungsi untuk melegitimasi kehendak eksekutif dalam proses penyelenggaraan pemerintah yang penuh formalisme politik. Pemilu sekadar menjalankan rutinitas politik yang meskipun berhasil terselenggara secara tertib, tetapi kualitas demokrasinya sangat rendah, dan bahkan cenderung antidemokrasi. Pada masa ini tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu sangat tinggi, mencapai lebih dari 90 persen dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih. Akan tetapi tingginya partisipasi itu lebih disebabkan karena mobilisasi politik oleh penguasa, dan bukan karena meningkatnya kesadaran politik warga masyarakat.

Rendahnya kesadaran politik masyarakat itu berkaitan dengan budaya politik yang berkembang di In-

5. Negara korporatis adalah Negara yang mengendalikan semua komponen kekuatan politik, baik kekuatan di seluruh lini institusi Negara sendiri maupun kelompok-kelompok masyarakat di luarnya. Uraian lengkap dapat dilihat pada Alfred Stepan, 1978, *State and Society: Peru in Corporative Perspective*, New Jersey: Princeton University Press.

donesia selama ini. Terdapat beberapa cara dalam upaya menjelaskan fenomena politik, akan tetapi yang paling sederhana dapat dibedakan dengan pendekatan struktural dan kultural. Penjelasan ekonomi politik misalnya, termasuk bersifat strukturalis yang mencoba menjelaskan dengan mengaitkan antara persoalan politik dengan masalah ekonomi. Ada juga pendekatan lain yang lebih cenderung strukturalis yaitu dengan menjelaskan fenomena politik dari analisis hubungan negara dan masyarakat dengan kata kunci *civil society*. Pendekatan ini cukup mampu menjelaskan fenomena politik di era Orde Baru dengan negara berposisi sebagai variabel utama dalam mempengaruhi berbagai peristiwa politik yang ada.

Sementara pendekatan yang bersifat kulturalis meyakini bahwa kultur lebih dominan dalam mempengaruhi berbagai fenomena politik. Untuk menyebut beberapa teoretisi yang masuk kategori pendukung kulturalis yang pernah melakukan studi di Indonesia antara lain, Don Emerson, Ben Anderson, Clifford Geertz, Bill Liddle, Karl Jackson, dan Harold Crouch. Sementara itu, suatu studi yang bersifat kulturalis adalah Gabriel Almond dan Sidney Verba, ketika keduanya melakukan kajian di lima negara yang kemudian melahirkan buku yang sangat berpengaruh pada dekade 1970-an, *The Civic Culture*.

Budaya politik, kata Almond dan Verba, merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu ter-

hadap peranan yang dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain adalah orientasi psikologis terhadap obyek sosial, dalam hal ini sistem politik yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, afektif, dan evaluatif.

Orientasi yang bersifat kognitif merupakan pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibu kota negara, lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan sebagainya. Sementara itu orientasi afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut feelings terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluatif menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya⁶.

Dalam suatu masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik yang parokial. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subyektif. Akhirnya, masyarakat yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang sedang berjalan, akan terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat *partisipatif*⁷.

Almond dan Verba mengemukakan tesis bahwa budaya politik yang demokratis, dalam hal ini budaya politik yang partisipatif, akan mendukung terbentuknya sistem politik yang demokratis dan stabil. Ia mengemukakan bahwa berdasarkan hasil penelitiannya di sejumlah negara yaitu di AS, Inggris, Jerman, Italia, dan Meksiko, menemukan di

negara-negara yang mempunyai budaya politik tinggi akan menopang demokrasi yang stabil. Sebaliknya, negara-negara yang memiliki budaya politik rendah tidak mendukung terwujudnya sistem politik demokratik yang stabil.

Tesis Almond dan Verba ini telah banyak dikritik, antara lain oleh Brian Berry yang mengatakan, bahwa dengan menggunakan "teori ekonomi tentang demokrasi" hasilnya ternyata membuktikan bahwa struktur politiklah yang melahirkan sikap-sikap yang disebut budaya politik tersebut⁸. Sementara Arend Lijphart mengatakan, bahwa ketika kita berbicara tentang kognisi, sebenarnya kita tengah berbicara pengaruh struktur politik (*realitas*) yang kemudian dipersepsikan oleh masyarakat dan akhirnya menggumpal menjadi kognisi (*kultur*) yang kita maksud⁹.

Apabila kita menggunakan model dari Almond dan Verba, dan kemudian melihat fenomena budaya politik di Indonesia, maka banyak yang sepakat bahwa dominasi sikap dan orientasi politik yang parokial dan subyektif masih terasa hingga sekarang. Meskipun format dan struktur politik sudah jauh lebih demokratis jika dibandingkan dengan era Orde Baru, tetapi kultur politiknya masih belum mengalami transformasi, karena itu demokrasi di Indonesia masih dalam tataran prosedural, belum merupakan demokrasi yang substansial.

Dalam masyarakat yang orientasi budaya politiknya parokial itulah, yang masih menganggap bahwa ikut Pemilu itu adalah kewajiban, dan bukan hak. Oleh karena itu, kelompok itulah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap persentase tingkat partisipasi dalam Pemilu selama ini. Sementara kalangan warga masyarakat yang mempunyai orientasi budaya politik partisipan, semakin kurang antusias dalam mengikuti Pemilu karena mereka tahu bahwa ikut

6. Pembahasan lebih lanjut, lihat Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, terutama bab 3 hal. 95-120. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

7. Lihat Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, 1963, *The Civic Culture*, The Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi dapat dikatakan, bahwa yang menyumbang semakin tingginya Golput adalah datang dari kalangan warga masyarakat yang memiliki orientasi budaya politik partisipan, yang sudah memiliki kesadaran politik dan biasanya datang dari kalangan kelas menengah ke atas.

Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ikut Pemilu itu adalah hak sekaligus kewajiban, sebagaimana dikatakan oleh informan di Mataram NTB. Ditanya mengenai apakah bagi masyarakat Pemilu itu hak atau kewajiban, informan itu menjawab bahwa bisa kedua-duanya. Ya hak, ya

kewajiban. Yang jelas, menurutnya, mencoblos itu merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Jadi pada hakikatnya itu adalah keharusan.

Sementara itu, ada informan yang berpendapat, bahwa tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu tak ada kaitannya dengan kesadaran masyarakat mengenai apakah Pemilu/Pilkada itu hak atau kewajiban. Masyarakat, menurutnya belum sampai pada tingkat kesadaran itu. Kalau pun tingkat partisipasi itu cukup tinggi, seperti dicontohkannya dalam Pilkada NTB beberapa bulan yang lalu, itu karena usaha para tim sukses calon-calon kepala daerah yang sangat intensif dan pintar untuk menarik masyarakat memilih calon yang mereka taarkan. Demikian juga

sebaliknya, kalau pun rendah itu karena kurangnya para tim sukses ini berkampanye kepada masyarakat untuk memilih calon yang mereka tawarkan. Faktor lain yang mendorong tinggi dan rendahnya partisipasi memilih di masyarakat NTB khususnya adalah figur yang ditawarkan. Kalau figur itu berwibawa dan memiliki basis pendukung yang luas, ya tinggi juga yang ikut, seperti di NTB ini dengan kehadiran figur 'tuan guru.' Demikian juga sebaliknya, kalau nilai jual figurnya 'murah,' maka akan 'rendah' juga tingkat mereka yang akan memilih.

Kesimpulan

Golput jelas bukan suatu gerakan. Catatan di atas menunjukkan bahwa 'menurunnya tingkat pemilih' adalah suatu ancaman yang nyata dan riil. Namun, Golput di situ bukanlah Golput sebagai suatu 'gerakan politik' yang dikenal dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Golput di sini kombinasi dari sikap: *pertama*, apatisisme, sikap cuek dan tidak peduli, yang sebenarnya sudah lazim, bahkan dalam negara dengan tingkat melek politik yang paling maju sekalipun. Apatisisme masyarakat itu berkaitan dengan deligitimasi Parpol dan juga pemerintah sendiri yang dianggap kurang mampu membawa perubahan sebagaimana dijanjikan dalam kampanye.

Kedua, berkaitan dengan kinerja KPU yang berhadapan dengan masalah kekurangmampuan panitia dan aparatusnya, dalam penyelenggaraan Pilkada/Pemilu sehingga banyak pemilih yang tidak terdaftar, atau yang sudah terdaftar tidak mendapat kartu

pemilih. Salah satu sebab adalah karena ketidاكلancaran pendanaan dan terbatasnya sumber daya manusia di kalangan KPU sendiri. Diperlukan suatu kerjasama secara sinergis di antara instansi terkait yang bahu membahu dengan mitra strategis di lapangan, agar kinerja KPU semakin dapat ditingkatkan. Di samping itu, kurangnya sosialisasi yang intensif maka warga masyarakat kurang paham terhadap cara melakukan teknik memilih di bilik suara. Akibatnya terjadi kerusakan suara cukup tinggi, karena kurangnya pemahaman pemilih terhadap sistem dan aturan pemilihan. Perubahan sistem dan aturan ikut mendorong gejala ini.

Ketiga, adanya kejenuhan masyarakat terhadap Pemilu sebagai akibat tingginya kegiatan Pemilu. Kejenuhan masyarakat juga merupakan penyebab makin rendahnya tingkat partisipasi Pemilu. Sejak adanya pilihan langsung, rakyat semakin sering mengikuti berbagai Pemilu, baik

8. Lihat Brian Berry, 1970, *Sociologists, Economists and Democracy*.

9. Arend Lijphart, 1984, *Democracies: Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, New Heaven Conn: Yale University Press.

dari tingkat Pilkades, Pilkada Kabupaten/Kota, Pilkada Gubernur, dan Pilpres, dan Pilihan Caleg. Tingginya frekuensi keterlibatan masyarakat dalam Pemilu itu membuat masyarakat menjadi jenuh.

Keempat, berkaitan dengan berkembangnya persepsi bahwa Pemilu itu antara hak dan kewajiban. Sebagian warga mengatakan ikut Pemilu itu hak dan sebagian lagi merupakan kewajiban. Hal ini berkaitan dengan budaya politik yang berkembang di kalangan warga negara Indonesia. Dalam masyarakat yang orientasi budaya politiknya parokial, masih menganggap bahwa ikut Pemilu itu adalah kewajiban, dan bukan hak. Oleh karena itu, kelompok itulah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap persentase tingkat partisipasi dalam Pemilu selama ini. Sementara kalangan warga masyarakat yang mempunyai orientasi budaya politik partisipan, semakin kurang antusias dalam mengikuti Pemilu karena mereka tahu bahwa ikut Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi dapat dikatakan, bahwa yang menyumbang se-

makin tingginya Golput adalah datang dari kalangan warga masyarakat yang memiliki orientasi budaya politik partisipan, yang sudah memiliki kesadaran politik dan biasanya datang dari kalangan kelas menengah ke atas.

Dari keempat gejala itu, hanya yang pertama dan keempatlah, yang boleh dikatakan mencerminkan gejala Golput. Itu pun bukan suatu gerakan politik, meski pasti berdampak politik, tetapi lebih sebagai reaksi yang bersifat individual. Dua gejala ini pasti tidak akan bisa dihapuskan, karena ia telah menjadi bagian dari sistem dan perundangan Pemilu itu sendiri, di mana Pemilu lebih merupakan hak rakyat. Terserah rakyat mau ikut memilih atau pun tidak memilih. Kecuali bila Pemilu ditetapkan sebagai 'kewajiban' di mana ada sanksi-sanksi hukum terhadap mereka yang tidak memilih. Karena itu, yang bisa dilakukan hanyalah menekan angka itu sekecil-kecil dan serendah-rendahnya.

Sementara kasus 'Golput' kedua dan ketiga, tak ada lain kecuali mendengarkan dan mengiyakan rekomendasi beberapa responden agar KPU/KPUD dan aparatusnya lebih intensif, serius, dan tepat melakukan pekerjaannya, mulai tingkat pendaftaran hingga pen'centangan, sangatlah relevan. Diyakini karena faktor-faktor yang bersifat teknis inilah,

lahir banyak suara yang diindikasikan 'Golput' tersebut.

Tingkat partisipasi pemilih dan potensi Golput juga berkaitan dengan wilayah geografis, baik karena faktor kelas, ekonomi, maupun afiliasi politik-keagamaan. Wilayah perkotaan, yang dihuni kalangan urban dan terdidik, diyakini memiliki potensi Golput jauh lebih besar daripada di pedesaan. Pemahaman di perkotaan bahwa ikut memilih itu adalah hak dan kesadaran politik yang lebih kritis tentu menjadi faktor yang dominan menentukan tingkat partisipasi pemilih. Sebaliknya, di pedesaan Pemilu masih banyak dipahami sebagai 'hak' dan tanggung jawab sebagai warga negara. Pada saat yang sama, tingkat kesadaran politik pada umumnya juga lebih rendah.

Catatan dari lapangan yang diperoleh studi ini menunjukkan Golput memiliki banyak faktor dan nuansanya sangat beragam. Nuansa ini penting dipahami untuk kepentingan menekan angka Golput itu di satu pihak, dan di pihak lain, membaca pikiran yang ada di tengah masyarakat. Nuansa ini sering tenggelam ketika kita membaca 'Golput' sebagai gejala statistik belaka.

Harapan Masyarakat Terhadap Pemilu 2009

Perkembangan demokrasi harus ditopang oleh keberdayaan politik warga negara dalam menentukan pilihan-pilihan politiknya ditopang oleh tingkat perkembangan ekonomi dan pengetahuan serta informasi memadai untuk menentukan pilihan-pilihan politik. Tingkatan sosial-ekonomi, setidaknya kepastian warga negara dalam mendapatkan sumber pendapatan ekonomi dan lapangan pekerjaan, sangat menentukan keberdayaan politik.

Demikian pula, pengetahuan dan informasi memadai, khususnya

berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2009, sangat dibutuhkan untuk menentukan pilihan-pilihan politik. Sikap skeptis, sebagaimana dikemukakan di atas, bisa dikatakan menunjukkan masih kurangnya dukungan keberdayaan politik ini, baik dari segi sosial-ekonomi maupun sumberdaya pengetahuan dan ketersediaan informasi untuk menentukan pilihan-pilihan politik dalam Pemilu 2009.

Peningkatan kehidupan sosial-ekonomi memerlukan waktu yang panjang, sebagai hasil dari proses pembangunan sosial-ekonomi sedang

berjalan. Keberdayaan politik bisa ditingkatkan dari segi ini, selain terus melakukan perbaikan atas kualitas kehidupan sosial-ekonomi, juga bisa dilakukan dengan memberikan harapan lebih kepada warga masyarakat bahwa Pemilu 2009 yang akan datang mampu memperbaiki kualitas hidup warga masyarakat, dari pemerintahan yang akan dihasilkan oleh Pemilu 2009 nanti. Perbaikan tingkat sosial-ekonomi warga masyarakat merupakan pilihan sangat rasional sekaligus fungsional mampu meningkatkan partisipasi politik warga dalam Pemilu 2009 dengan mengatasi masalah-masalah sosial-ekonomi dihadapi warga masyarakat.

Selain itu, keberdayaan politik juga bisa ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan lebih, melakukan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan Pemilu demokratis 2009, serta memberikan informasi yang memadai terhadap jalannya Pemilu 2009, dalam setiap tahapan-tahapan yang ada. Sosialisasi bagaimana agar Pemilu 2009 berjalan demokratis, berdasar prinsip-prinsip nilai demokrasi, mengedepankan hak-hak politik warga negara dalam penentuan kebijakan, kesetaraan politik, dan pengakuan atas perbedaan yang ada, merupakan hal penting perlu dilakukan. Demikian pula, persoalan-persoalan bersifat teknis, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009 dalam setiap tahapan-tahapannya, juga perlu disosialisasikan sehingga warga masyarakat memiliki pedoman dan acuan yang cukup dalam menentukan pilihan-pilihan mereka secara bebas dan mandiri.

Perbaikan tingkat sosial-ekonomi dan ketersediaan sum-

berdaya pengetahuan dan informasi tentang Pemilu 2009 sangat menentukan bagi peningkatan partisipasi politik warga negara, untuk mengurangi skeptisisme politik, atau memperkecil angka Golput dalam Pemilu nanti. Peningkatan partisipasi politik warga negara ini sangat penting untuk pengembangan demokrasi ke depan, khususnya untuk meningkatkan legitimasi politik dalam pemerintahan, sehingga kebijakan pembangunan semakin berkualitas dan mendapat dukungan politik cukup memadai dari warga masyarakat untuk menjalankan proses pembangunan.

Sosialisasi dan peningkatan ketersediaan pengetahuan dan informasi tentang Pemilu 2009 penting dilakukan dengan mempertimbangkan harapan-harapan diberikan warga masyarakat terhadap Pemilu 2009, khususnya terhadap partai politik peserta Pemilu dalam menjalankan demokrasi. Tiga fungsi penting partai politik diharapkan berjalan dalam Pemilu nanti, yaitu fungsi memperjuangkan konstituen atau warga negara, fungsi pendidikan politik, dan fungsi mencetak calon pejabat publik, baik di pusat maupun di daerah.

Berkaitan dengan tiga fungsi partai politik ini, responden umumnya menaruh harapan sangat besar pada fungsi pertama memperjuangkan kepentingan warga masyarakat, dibanding fungsi kedua dan ketiga. Tawaran pemecahan atas masalah-masalah sosial-ekonomi dihadapi warga masyarakat dari partai politik sangat diharapkan, dengan berharap partai politik lebih berorientasi pada demokrasi berorientasi peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Sementara itu, fungsi pendidikan politik merupakan harapan selanjutnya dengan pertimbangan bahwa penguasaan pengetahuan demokrasi yang semakin meningkat dengan sendirinya akan memperbaiki kualitas calon pejabat publik yang diajukan oleh partai-partai politik yang ada.

Partisipasi warga dalam Pemilu 2009 akan semakin meningkat, dan

jumlah Golput akan berkurang, bila partai-partai politik yang ada, bersama dengan elemen-elemen masyarakat sipil lainnya, juga ikut melakukan pendidikan politik, melakukan sosialisasi Pemilu secara demokratis kepada masyarakat luas melalui program-program dan aktivitas dijalankan. Sementara, lembaga independen penyelenggara Pemilu, seperti KPU, Banwaslu, dan lainnya, dapat memfasilitasi tumbuhnya dialog publik dan kampanye dalam bentuk diskusi publik yang bebas dan terbuka, sehingga dihasilkan kehidupan politik demokrasi penuh makna, atau penuh arti, atau fungsional, bagi kehidupan sosial-ekonomi dan perkembangan demokrasi.

Pengembangan kualitas komunikasi politik diantara berbagai pihak, terutama antara kontestan Pemilu dengan warga masyarakat dan fasilitasi memadai dari lembaga penyelenggara Pemilu bagi tumbuhnya dialog publik dan diskusi publik penuh arti, atau penuh makna, sangat diperlukan untuk memajukan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu 2009.

